



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612**

**PENGUMUMAN
NOMOR : 1 /ASN/Polhukam/12/2022**

**TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Dalam rangka pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 321 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 2022, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan ketentuan sebagai berikut:

I. FORMASI YANG DIBUTUHKAN

Jumlah alokasi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 2022 adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) formasi dengan rincian sebagai berikut:

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	Perencana Ahli Pertama	S1 Manajemen/ S1 Akuntansi/ S1 Ilmu Ekonomi	5	1	Sekretariat Kemenko Polhukam
2	Pranata Humas Ahli Pertama	S1 Ilmu Komunikasi/ S1 Jurnalistik	5	2	Sekretariat Kemenko Polhukam
3	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S1 Ilmu Hukum/ S1 Manajemen/ S1 Sosial dan Politik/ S1 Pemerintahan	5	5	Sekretariat Kopolnas
4	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	S1 Ekonomi Manajemen SDM	5	1	Sekretariat Kopolnas

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
5	Arsiparis Ahli Pertama	S1 Kearsipan/ S1 Manajemen/ S1 Administrasi Niaga	5	7	Sekretariat Kopolnas
6	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S1 Manajemen/ S1 Administrasi/ S1 Teknik Informatika	5	1	Sekretariat Kopolnas
7	Perencana Ahli Pertama	S1 Manajemen/ S1 Ekonomi	5	2	Sekretariat Kopolnas
8	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S1 Ilmu Komunikasi/ S1 Jurnalistik	5	2	Sekretariat Kopolnas
9	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1 Teknik Komputer/ S1 Telekomunikasi/ S1 Teknik Informatika	5	2	Sekretariat Kopolnas
10	Pustakawan Ahli Pertama	S1 Ilmu Perpustakaan	5	1	Sekretariat Kopolnas
Total				24	

***MHPK : Masa Hubungan Perjanjian Kerja**

II. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) dan dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) pada saat mendaftar (usia yang dihitung berdasarkan tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah pada saat pelamar melakukan pendaftaran *online*);
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan (untuk jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama dan jabatan Pustakawan Ahli Pertama);
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun dibidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
10. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
12. Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Polhukam (Sekretariat Kemenko Polhukam dan Sekretariat Kopolnas);
13. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Bagi Wanita tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi Pria tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
15. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah;
16. Pelamar merupakan lulusan:
 - a. Sarjana/S-1 lulusan Perguruan tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
 - b. Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, pada ijazah dilengkapi dengan surat keputusan penyetaraan ijazah dan pada transkrip nilai melampirkan transkrip

nilai asli dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

17. Bagi pelamar disabilitas, pada saat melamar di SSCASN wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan dibuktikan dengan:
 - a. Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
18. Sudah melakukan Vaksin Covid-19 dosis lengkap (minimal telah vaksin dosis ke-2).

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Dokumen persyaratan umum yang **wajib** diunggah pada saat mendaftar terdiri dari :
 - a. Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, diketik menggunakan Komputer, ditandatangani oleh pelamar dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi materai Rp.10.000,- sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Format surat lamaran dapat diunduh di laman <https://www.polkam.go.id>.
 - b. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
 - c. Ijazah asli.
 - d. Transkrip nilai asli.
 - e. Pas photo formal terbaru berlatar belakang merah ukuran 4x6.
 - f. Surat keterangan pengalaman kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling singkat 2 (dua) tahun dibidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar.
 - g. Surat Pernyataan 5 (lima) poin dengan ketentuan diketik menggunakan komputer, ditanda tangani oleh pelamar dengan pena tinta warna hitam dan dibubuhi materai Rp.10.000,- sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Format surat pernyataan dapat diunduh dilaman <https://www.polkam.go.id>.
 - h. Surat pernyataan kesediaan ditempatkan di seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Polhukam (Sekretariat Kemenko Polhukam dan Sekretariat Kopolnas) dengan ketentuan diketik menggunakan komputer, ditandatangani oleh pelamar

dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi materai Rp.10.000,- sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Format surat pernyataan dapat diunduh dilaman <https://www.polkam.go.id>.

2. Dokumen persyaratan khusus yang diunggah pada saat mendaftar terdiri dari :
 - a. Bagi pelamar yang mendaftar jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama **wajib** melampirkan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level-1.
 - b. Bagi pelamar yang mendaftar jabatan Pustakawan Ahli Pertama melampirkan Sertifikat Kompetensi kerja Pustakawan masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan, bila memiliki (**tidak wajib**).
3. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
4. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dimulai pada tanggal 21 Desember 2022 s.d. 6 Januari 2023.
5. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan pelamar gugur/tidak lulus.
6. Pelamar yang tidak unggah salah satu dokumen persyaratan yang sifatnya **wajib**, dapat mengakibatkan pelamar gugur/tidak lulus.
7. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

V. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi, yaitu melakukan verifikasi *online* persyaratan kelengkapan administrasi atas dokumen pelamar yang telah di *upload* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Seleksi Kompetensi dan Wawancara menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT).
 - 1) Seleksi Kompetensi meliputi:
 - a) Kompetensi Teknis;
 - b) Kompetensi Manajerial;
 - c) Kompetensi Sosial Kultural.
 - 2) Wawancara meliputi penilaian integritas dan moralitas.

VI. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi *online* dokumen yang telah diunggah, akan diumumkan oleh panitia pada laman <http://www.polkam.go.id>. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Pelaksana Seleksi, pelamar dapat mengajukan sanggahan dengan ketentuan:

- a) Paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
 - b) Sanggahan diajukan melalui SSCASN;
 - c) Panitia Seleksi Instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
 - d) Panitia Seleksi Instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
 - e) Apabila sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
2. Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika memenuhi Nilai Ambang Batas yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nilai Ambang Batas terdiri dari:
 - a) Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis;
 - b) Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial dan sosial kultural; dan
 - c) Nilai Ambang Batas wawancara.

VII. JADWAL SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENKO POLHUKAM TA 2022

NO	TAHAPAN	PELAKSANAAN
1	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 s.d. 3 Januari 2023
2	Pendaftaran Seleksi	21 Desember 2022 s.d. 6 Januari 2023
3	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d. 11 Januari 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d. 15 Januari 2023
5	Masa Sanggah	16 s.d. 18 Januari 2023
6	Jawab Sanggah	19 s.d. 25 Januari 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d. 28 Januari 2023
8	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d. 22 Februari 2023
9	Penarikan Data Final	23 s.d. 24 Februari 2023
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d. 1 Maret 2023
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	2 s.d. 7 Maret 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d. 3 April 2023
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	20 Maret s.d. 6 April 2023
14	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret s.d. 8 April 2023
15	Pengumuman Kelulusan	9 s.d. 11 April 2023
16	Masa Sanggah	12 s.d. 14 April 2023
17	Jawab Sanggah	14 s.d. 20 April 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d. 29 April 2023
19	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d. 22 Mei 2023
20	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei s.d. 20 Juni 2023

VIII. LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dilakukan melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 21 Desember 2022 s.d. 6 Januari 2023.
2. Tempat seleksi kompetensi dilaksanakan di Gedung *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara (BKN).
3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Terhadap pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
5. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia Seleksi Instansi dapat menggantikan dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya.
6. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
7. Pelamar seleksi PPPK yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan maka perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.
8. Masa Hubungan Perjanjian Kerja dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi.
9. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
10. Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Kepada para pelamar, pihak keluarga dan pihak lainnya dilarang memberikan sesuatu kepada panitia seleksi dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengadaan ASN - PPPK Kemenko Polhukam, apabila

diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

11. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
12. Keputusan Panitia Seleksi mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
13. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di <https://www.polkam.go.id>.
14. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait Pengadaan ASN-PPPK Kemenko Polhukam TA 2022 dapat menghubungi *Call Center* :
 - Telepon (021) 34833702 pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.30 s.d. 15.00 WIB.
 - Telepon (021) 3521121/3520145 EXT. 8603 dan 7021 pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.30 s.d. 15.00 WIB.
 - facebook Polhukam RI : <https://www.facebook.com/PolhukamRI>
 - Twitter @PolhukamRI : <https://mobile.twitter.com/polhukamri>
 - instagram Polhukam: @polhukamri
 - email: pengadaanASNpolhukam2022@gmail.com

Jakarta, 20 Desember 2022

Ketua Panitia Seleksi Instansi
Kemenko Polhukam TA 2022



Teguh Pudjo Rumecko